

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL IKAN TAMBAK
DI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
ZIA'UL HAQ
01360948**

PEMBIMBING

- 1. DRS. KHOLID ZULFA, M.SI.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, SH., M.HUM.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK

Adanya perselisihan dalam suatu perjanjian khususnya perjanjian bagi hasil perikanan dikarenakan perjanjian didasarkan pada peraturan hukum adat yaitu peraturan yang tidak tertulis atau adat setempat. Pada umumnya perjanjian itu dibuat berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, oleh karena itu salah satu tujuan daripada dibuatnya Undang-undang No 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan adalah untuk menghilangkan unsur-unsur perjanjian bagi hasil yang bersifat pemerasan, supaya masing-masing pihak yang membuat perjanjian tersebut mendapat bagian yang sesuai dengan jasa yang diberikannya. Satu sisi hukum Islam juga memiliki aturan-aturan tentang perjanjian bagi hasil yang disebut dengan *muzāra'ah* agar terwujud rasa keadilan.

Berangkat dari problem di atas penyusun tertarik untuk membandingkan antara hukum positif dan hukum Islam dalam memandang pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, karena hukum positif dan hukum Islam memiliki aturan yang berbeda-beda. Dalam hukum positif bentuk perjanjian harus dilakukan dengan cara tertulis sedangkan hukum Islam tidak diwajibkan. Adapun pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), sementara sifat penelitian ini adalah diskriptif analitik komparatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi (pengamatan) dan metode interview (wawancara). Dalam menganalisis menggunakan analisis data secara kualitatif dengan metode induksi dan deduksi.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa masyarakat Manyar dalam melaksanakan bentuk perjanjian yang dilakukan hanya dengan cara lisan saja dan tanpa dalam bentuk tertulis. Begitu juga dengan sistem perjanjian yang masih beraneka ragam serta jangka waktu perjanjian minimal satu kali panen dan tidak dijelaskan batas maksimalnya. Adapun cara penyelesaian masalah apabila terjadi persengketaan antara pemilik dan penggarap maka biasanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Manyar dalam menggunakan hukum adat setempat adalah ketidaktahuan masyarakat tentang keberadaan undang-undang tersebut. Begitu juga minimnya masyarakat mengetahui perjanjian bagi hasil menurut hukum Islam (*muzāra'ah*)

Dari uraian di atas kiranya dapat dikatakan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan tambak di Kecamatan Manyar secara garis besar tidak sesuai dengan hukum positif atau undang-undang yang ada. Namun bila dilihat dari segi hukum Islam, secara garis besar maka hal tersebut sesuai karena terpenuhi syarat dan rukunnya baik dari subjek atau objeknya. Dan substansi dari hukum Islam adalah sama-sama rela dari masing-masing pihak yang membuat perjanjian.

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Zia'ul Haq

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zia'ul Haq
N.I.M : 01360948
Judul : "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ikan Tambak di
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Perspektif Hukum
Positif dan Hukum Islam"

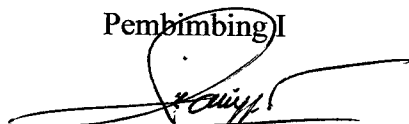
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Ramadhan 1427 H
15 Oktober 2006 M

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Zia'ul Haq

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zia'ul Haq
N.I.M : 01360948
Judul : "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ikan Tambak di
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Perspektif Hukum
Positif dan Hukum Islam"

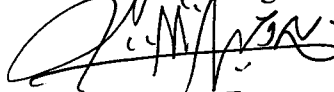
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Ramadhan 1427 H
15 Oktober 2006 M

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
NIP. 150 300 640

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL IKAN TAMBAK DI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh:

ZIA'UL HAQ
NIM : 01360948

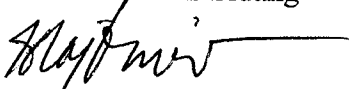
Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 16 November 2006 M / 24 Syawal 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 04 Dzulqa'dah 1427 H
25 November 2006 M

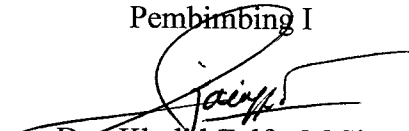


Panitia Ujian Munaqasyah

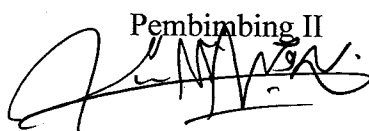
Ketua / Sekretaris Sidang


Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 275 462

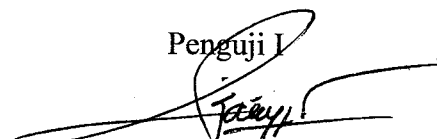
Pembimbing I


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740

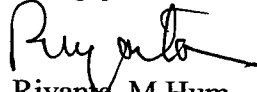
Pembimbing II


Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
NIP: 150 300 640

Penguji I


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740

Penguji II


Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP: 150 259 417

MOTTO

Kehidupan Adalah Awal Dari Sebuah Kematian

Oleh Karenanya:

Berani Hidup Jangan Takut Mati

Takut Mati Jangan Hidup

Takut Hidup Mati Saja

PERSEMBAHAN

Almamaterku tercinta:

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tuaku:

Aba H. Anwar Syadat (Alm) yang terhormat, berkat do'a dan wejangan beliau yang masih mengalir darahku hingga menggumpal menjadi sebuah kekuatan dalam perjalanan masa studiku maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga arwahnya senantiasa diterima disisi-Nya Amin.

Umi Hj. Nuriya Jamil terkasih, dengan do'a dan belaian kasih sayang beliau, yang senantiasa memberikan cahaya disetiap langkahku dalam menggapai ilmu.

Kakak-kakaku:

Hj Shofiyah + H. Abd Kholiq, H. Ubaidillah + Hj Sofi Mahfudhoh,

Hj. Ainiyah + Choirul Huda dan H. Mujib R. + Siti Rahmah

Terimah kasih atas do'a, pengertian dan supportnya

Keponakan-keponakanku:

Barur, A'am, Ifan, Feri, Zaki, Nanis, Ella dan Faiq

Yang kucaintai dan kusayangi

Mahadewiku:

Khusnul Nur Rahmah

Yang tercinta

Sahabat-sabat seperjuangan:

Dido, Sofi, Hisyam, Ii' Teqi, Muis L.A, Muis Hatta, Said, Indar, Wawa, Rif,

The-menth, Awim, ibad, Boim, Hadi, A'im,

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi

ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر

Ditulis

Zakâh al-fiṭri

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	Ditulis	A
فَعَلَ	fathah	Ditulis	fa'ala
كَسَرَ	kasrah	Ditulis	i
كَسَرَ	kasrah	Ditulis	zukira
دَمَمَ	dammah	Ditulis	u
دَمَمَ	dammah	Ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	â
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	â
4	dammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	tansâ
		Ditulis	î
		Ditulis	karîm
		Ditulis	û
		Ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	bainakum
		Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Ẓawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد

Segala puji dan Syukur penyusun panjatkan bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada sang revolusioner sejati dunia Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran mulia untuk mengarahkan kehidupan manusia dari zaman yang penuh dengan kebodohan dan kedholiman menuju zaman yang penuh cahaya kebenaran dan ilmu.

Barang kali apa yang penyusun sajikan ini merupakan karya tulis atau skripsi yang teramat sederhana, atau bahkan kurang dari itu. Sebagai karya tulis atau skripsi yang dipersiapkan guna memenuhi syarat mendapatkan gelar S1 ini, penyusun telah mempersiapkan dalam jangka yang cukup lama, begitu juga telah menguras tenaga dan pikiran. Apapun hasilnya, arti penting bagi penyusun adalah pengalaman batin yang tak tenilai harganya, mudah-mudahan pengalaman tersebut dapat membawa manfa'at bagi penyusun dalam mengarungi dunia.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak para pihak yang sangat berarti bagi penyusun, oleh karena itu sebagai tanda syukur dan penghargaan, maka tidak lupa penyusun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

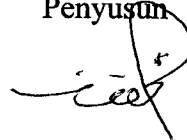
1. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga beserta segenap pimpinan Fakultas dan Ketua Jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta atas bimbingan dan perhatiannya.
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku pembimbing I dan Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum., selaku pembimbing II, meskipun dalam kesibukannya yang luar biasa, masih bisa menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan yang tulus dan ikhlas dengan meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penyusun, sehingga sangat berguna sekali dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Camat Manyar Kabupaten Gresik, Kepala Desa Manyar Rejo, Kepala Desa Leran dan Kepala Desa Banyuwangi atas informasi dan data-datanya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Aba (alm) dan Ummi serta saudara-saudaraku yang tak henti-henti mengalirkan do'a restunya dalam jiwaku untuk menyelesaikan masa studi.
5. Iga wekasku yang selalu memberikan support, pengertiannya serta kesabarannya dalam mendampingi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayah, Mami dan keluarga Kweni Bantul atas do'a dan wejangan-wejangannya sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.

7. Segenap sahabat-sahabat PMII Fakultas Syari'ah khususnya Korp GOOT, sahabat-sahabat komunitas Mata Air, teman-teman Wisma Feodal, teman-teman Pondok Wejangan dan teman-teman ELSAQ Press, atas motivasinya- serta arti kehidupan yang diberikan sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi.

Dengan rendah hati penyusun hanya bisa berdo'a semoga para pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini senantiasa mendapat balasan dari Allah SWT. dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfa'at bagi penyusun sendiri pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif (membangun) penyusun terima dengan senang hati..

Yogyakarta: 16 Ramadhan 1427
10 Oktober 2006

Penyusun



Zia'ul Haq
NIM: 01360948

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19

**BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 22**

A. Perjanjian Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 22

1. Pengertian Perjanjian 22

2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian..... 25

3. Subjek Perjanjian 27

4. Objek Perjanjian 28

5. Asas-asas Perjanjian 30

6. Batalnya Perjanjian 31

B. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Positif 33

C. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Islam 36

**BAB III : PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL IKAN TAMBAK
DI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK 45**

A. Gambaran Umum Lokasi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.... 45

B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ikan Tambak 47

1. Bentuk Perjanjian 47

2. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarap 50

3. Sistem Perjanjian 53

4. Jangka Waktu Perjanjian 59

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perjanjian
Bagi Hasil di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik 60

D. Penyelesaian Masalah 62

BAB IV : ANALISIS KOMPARASI PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL IKAN TAMBAK DI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 66

A. Analisis Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ikan Tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.....	66
1. Bentuk Perjanjian	66
2. Sistem Perjanjian	70
3. Jangka Waktu Perjanjian	74
5. Cara Menyelesaikan Masalah	76
B. Analisis Komparasi Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ikan Tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	78
1. Aspek Persamaan antara Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ikan Tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	79
2. Aspek Perbedaan antara Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ikan Tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.....	80

BAB V : PENUTUP 85

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	I
1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA	III
3. DAFTAR PERTANYAAN	V
4. NAMA-NAMA RESPONDEN.....	VIII
5. SURAT-SURAT	X
6. UU NO 16 TAHUN 1964	XIX
7. CURRICULUM VITAE	XXVII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya krisis moneter yang berlanjut krisis ekonomi global yang dimulai masa pertengahan tahun 1997 mempunyai dampak sangat luas dengan runtuhnya berbagai sektor ekonomi riil, mulai dari sektor industri skala besar, properti, perbankan, hingga usaha kecil dan pada ujungnya mengakibatkan rusaknya tatanan perekonomian secara umum.

Sedangkan secara khusus, perekonomian yang masih bertahan menghadapi dampak-dampak dari krisis global tersebut adalah perekonomian yang berbasiskan perekonomian masyarakat tradisional dalam skala kecil di level akar-rumput (pertanian),¹ namun sampai saat ini, perekonomian masyarakat di tingkat pedesaan/akar rumput (pertanian) masih belum berubah banyak dibanding pada masa kemerdekaan diproklamasikan, padahal penduduk yang tinggal di pedesaan merupakan mayoritas dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Mereka belum dapat melepaskan diri dari sifatnya yang tradisional dan subsistens.² Oleh karena itu negara Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya masih dikategorikan sebagai masyarakat yang bercorak agraris, karena sebagian besar penduduknya bermukim di pedesaan dan mereka menggantungkan kehidupan serta

¹ Ahmad Muwafiq, "Otonomi Daerah di Arus Kepentingan Global", makalah disampaikan pada seminar Otonomi Daerah tinjauan lokalitas, diselenggarakan oleh Graha Bhumi Pala Setda. Temanggung Jawa Tengah, 5 september 2005, hlm.1

² *Ibid.*, hlm. 6

penghasilannya dari usaha-usaha di bidang pertanian, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar hidupnya dari pertanian.

Namun itu semua diketahui bahwa sebagian besar hidup petani masih dalam alam kemiskinan, apalagi akhir-akhir ini banyaknya persoalan-persoalan yang harus dilewati oleh para petani. Untuk itu pada saat ini yang perlu diketahui adalah apa yang menjadi penyebab para petani (khususnya pengelola) tidak dapat meningkatkan taraf hidupnya seperti yang diharapkan. Dalam hal ini penulis akan membahas masalah yang menyangkut pola perekonomian petani yaitu mengenai pelaksanaan bagi hasil ikan tambak yang terjadi di wilayah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Pada umumnya peraturan mengenai perjanjian bagi hasil ikan tambak yang banyak digunakan masyarakat adalah peraturan yang didasarkan pada peraturan hukum adat, yaitu peraturan yang tidak tertulis atau adat setempat. Pada umumnya perjanjian itu dibuat berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian itu lebih menekankan pada aspek kekeluargaan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat serta untuk menghormati hak dan kewajiban seseorang.

Perjanjian bagi hasil sering terjadi karena memang tanah itu diniatkan oleh pemiliknya untuk dibagi hasil dengan orang lain, sebagai sumber kehidupan bagi pemilik tanahnya, ataupun pada suatu waktu orang itu tidak mampu mengerjakan sendiri karena sedang memiliki kesibukan lain atau sedang uzur, sedangkan tanah

harus tetap produktif. Sehingga adanya suatu perjanjian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah.

Hakekat transaksi ini dapat diselami dengan memperhatikan 3 faktor utama :

- a. Dasarnya: pada saya ada tanah; tetapi tidak ada kesempatan/semangat untuk mengusahakannya sendiri sampai berhasil namun saya ingin memungut hasilnya; oleh karena itu saya membuat transaksi dengan orang lain, supaya ia mengerjakannya, menanaminya dan memberikan sebagian dari hasil panennya kepada saya
- b. Fungsinya: memproduksi milik tanah tanpa pengusahaan sendiri dan memproduksi tenaga kerja tanpa milik tanah sendiri;
- c. Obyeknya: tenaga kerja dan tanaman (bukan tanah)³

Hal tersebut masih banyak terjadi di masyarakat karena pertanian (agraria) selalu mendapat tekanan dalam awal dari suatu pembangunan yaitu antara lain karena pertambahan penduduk, permintaan yang ditimbulkan oleh industrisasi, efek komersialisasi, penguasaan teknologi dan ketidak mampuan yang umum dari sistem penguasaan tanah, sehingga banyak lahan-lahan peretanian berubah menjadi bangunan-bangunan baik rumah, perusahaan atau kantor-kantor, sehingga jumlah petani yang mempunyai tanah garapan lebih sedikit apabila dibandingkan dengan petani yang tidak memiliki tanah garapan.

Penyebaran yang meluas dari penyebaran perjanjian bagi hasil pertama-tama merupakan cetusan dari semakin besarnya jumlah petani yang tidak memiliki tanah dan kurang tersedianya lapangan pekerjaan dibidang industri dan kerajinan tangan. Maka, bagi penduduak yang tidak memiliki tanah menerima perjanjian bagi hasil sering kali merupakan kesempatan satu-satunya untuk bisa

³ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Liberti, 1981), hlm. 37.

mempertahankan kehidupan minimum mereka.⁴ Sebagai konsekwensi dari keadaan ini, maka tenaga kerja (buruh atau penggarap tambak) sering kali dengan keadaan terpaksa mengerjakan atau mengusahakan tanah tambak milik orang lain walaupun dengan syarat-syarat perjanjian yang tidak adil dan terasa berat. Sehingga hak atas bagian yang diberikan kepadanya sering kali tidak sesuai dengan tenaga yang digunakan untuk mengusahakan tanah tersebut dan cenderung berat sebelah.

Agama Islam adalah agama *rahmatan lilā'alamiin*, yang tentunya memiliki sebuah aturan-aturan atau hukum termasuk jenis kehidupan dengan kerja sama antara petani pemilik tanah dengan petani penggarap tanah atau disebut juga dengan perjanjian bagi hasil, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di ahirah meskipun harus dipahami secara luas, dalam arti hukum Islam pada dasarnya hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun secara sosial.⁵

Bentuk kerja sama ini disyari'atkan agar sesama manusia saling tolong menolong dengan adanya keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara yang satu dengan yang lainnya, hal ini merupakan landasan hubungan kerja sama yang baik yakni saling tolong menolong, saling menguntungkan dan tidak merugikan. Sebagiman firman Allah SWT.

وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان⁶

⁴ Werner Rool, "*Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia*", cet Ke-1 (Jakarta: C.V. Rajawali, 1983), hlm. 99

⁵ Agus Moh. Najib, "Māqasid al-Syari'ah," *Mazhabuna*, No. 2, (Januari 2003), hlm. 27-28.

⁶ Al- Maidah (5) : 2

Selain pernyataan di atas agama Islam juga telah memberikan prinsip-prinsip hubungan kerja sama yang baik yaitu adanya kerelaan, keadilan dan maslahah serta adanya *ishlah* apabila terjadi perselisihan.

Dalam aturannya tentang pola interaksi antara satu manusia dengan manusia lainnya, Islam menggariskan bahwa manusia tidak boleh menyakiti atau merugikan manusia lain, karena hak dan martabat manusia sangatlah terhormat dalam pandangan Islam bahkan sampai level makhluk yang paling rendah sekalipun seperti hewan dan tumbuhan.

Terkait dengan perjanjian, maka jelas bahwa akan menimbulkan suatu ikatan antara petani pemilik tambak dengan petani penggarap tambak dalam menentukan besarnya bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Hanya saja di sana sini ketentuan bagi hasil itu masih ditetapkan secara tradisional (secara hukum adat), dimana bentuk perjanjian itu tidak dibuat secara tertulis dan tidak pula ada keharusan untuk dibuat dihadapan pejabat (Kepala Desa), sehingga sering kali terjadi keragu-raguan dan tidak jarang menimbulkan perselisihan antara pemilik tambak dengan penggarap tambak. Hal ini karena tidak sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam yang menganjurkan untuk ditulis.

Hubungan manusia antara satu dengan yang lain, dengan siklus yang sedemikian rupa, menimbulkan alur perilaku yang tertata. Munculnya masalah di setiap tempat dengan corak yang berbeda menyebabkan masyarakat harus menyikapi dengan cara yang berbeda pula.⁷ Dengan kenyataan ini maka diperlukan hukum yang tegas guna mengontrol kerentanan manusia bersikap

⁷ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Ekonosia Fakultas Ekonomi UII, 2003), hlm. 78

untuk mencari pembenaran dalam setiap prilakunya. Maka Islam dengan tegas mengatur supaya manusia sesuai dengan hukum Allah SWT agar manusia selamat di dunia dan ahirat.⁸

Dengan mengetahui keadaan tersebut, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian pelaksanaan bagi hasil ikan tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dalam skripsi yang berjudul : *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ikan Tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas penyusun memfokuskan penelitian ini pada pokok masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan antara pemilik tambak dengan penggarap tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah:

⁸ *Ibid.*, hlm. 25

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan hukum baik hukum positif maupun hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah.
2. Secara aspek sosial, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan pemilik atau penggarap pada khususnya tentang prosedur perjanjian bagi hasil ikan tambak. Serta diharapkan dapat meningkatkan sikap profesionalisme kedua belah pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

D. Telaah Pustaka

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain karena ia tidak dapat hidup sendiri khususnya dalam masalah muamalah duniawiyah, disebabkan manusia tidak bisa tidak harus terkait dengan persoalan-persoalan akad (perjanjian) di antara sesamanya.

Banyaknya perselisihan-perselisihan perjanjian antara pemilik dan penggarap tambak pada saat ini karena adanya suatu perjanjian yang kurang

ditaati oleh salah satu pihak atau karena kurang jelasnya suatu perjanjian yang mereka buat, sehingga dapat menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.

Terkait dengan perjanjian hasil yang penyusun bahas dalam skripsi ini, penyusun telah menelaah literatur-literatur yang membahas tentang perjanjian antara lain :

1. Karya Subekti yang berjudul *Hukum Perjanjian* yang diterbitkan oleh PT Intermasa cetakan ke-10 tahun 1985. buku ini mengupas tentang pengertian perjanjian, syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian, batal dan pembatalan, personalia dalam perjanjian dan juga pelaksanaan perjanjian,
2. Karya M. Yahya Harahab yang berjudul *Segi-segi Hukum Perjanjian*, yang diterbitkan oleh P.T. Alumni Bandung cetakan ke-2 tahun 1986, buku ini mengupas antara lain tentang pengertian perjanjian, objek perjanjian dan subjek perjanjian
3. Karya Abdulkadir Muhammad yang berjudul *Hukum Perikatan*, diterbitkan oleh P.T. Alumni Bandung cetakan ke-1 tahun 1982, dalam buku ini juga memuat tentang pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, jenis-jenis perjanjian, syarat-syarat sah perjanjian, akibat hukum perjanjian yang sah, pelaksanaan perjanjian, penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian, faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya perjanjian dan juga mengupas tentang pembatalan perjanjian

Adapun mengenai perjanjian bagi hasil, hukum positif memiliki undang-undang khusus yang menjelaskan tentang perjanjian bagi hasil yakni Undang-undang No 2 tahun 1960, tentang *Perjanjian Bagi Hasil* yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 07 Januari 1960. Undang-undang ini memuat tentang pengertian perjanjian bagi hasil, penggarap, bentuk perjanjian, jangka waktu perjanjian serta kewajiban pemilik dan penggarap.

Kemudian Undang-undang No 16 Tahun 1964, tentang *Bagi Hasil Perikanan*, yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 September 1964. Undang undang ini memuat di antaranya tentang pengertian bagi hasil, pembagian hasil usaha, syarat-syarat bagi penggarap tambak, jangka waktu perjanjian,

Dari segi hukum Islam, literatur yang telah menyusun telaah mengenai perjanjian atau akad (istilah perjanjian dalam hukum Islam) dan perjanjian bagi hasil antara lain :

1. Karya Samsul Anwar dalam makalahnya yang disampaikan pada kuliah fiqih Muamalah II yang berjudul *Syarat dan Rukun Akad*, dalam makalah ini memuat tentang rukun akad, syarat terbentuknya akad, syarat keabsahannya akad, syarat berlakunya akibat hukum dan syarat mengikatnya akad.
2. Karya Rachmat Syafe'i yang berjudul *Fiqih Muamalah*, yang diterbitkan oleh Pustaka Setia Bandung, cetakan ke-2 tahun 2004, di dalamnya juga mengupas tentang akad baik dari segi pengertian, pembentukan akad, rukun akad unsur-unsur akad, syarat-syarat akad, dampak akad,

pembagian akad, sifat-sifat akad, di samping itu buku ini juga mengupas tentang muzārah/mukhābarāh atau tentang bagi hasil baik dari segi arti, landasan, rukun, sifat, syarat-syarat, ihwal (eksistensi), hukum (ketetapan) dan ahir (penghabisan).

3. Karya Ahmad Azhar Basyir yang berjudul *Asas-asas Hukum Muamalah*, yang diterbitkan oleh UII Press Yogyakarta, cetakan ke-2 tahun 2004. Memuat tentang pengertian akad, pembentukan akad, shighat akad, syarat akad .
4. Karya Chairuman Pasaribu, berjudul *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*, dalam buku ini memuat tentang berbagai macam persoalan yang menyangkut lalulintas hukum dibidang perjanjian
5. Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Fiqh Muamalah*, buku ini membahas tentang aturan-aturan dasar dalam bermuamalah antara lain tentang akad dan hal-hal yang berhubungan dengan perakadan/perikatan

Adapun karya tulis atau skripsi-skripsi yang mengupas tentang perjanjian bagi hasil atara lain adalah skripsi Tabarrot Adi Saputra yang membahas “Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, Waktu Penelitian Ditinjau dari Hukum Islam”. Dari skripsi ini hanya menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan paron sawah di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, serta cara menyelesaikan perselisihan.

Begitu juga dengan skripsi Fatuddin yang membahas "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian". Dari skripsi ini juga hanya menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerja bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Luwunggede Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes yang meliputi perjanjian bagi hasil dan pembagian hasilnya.

Dari dua skripsi tersebut jelas berbeda dengan skripsi yang penyusun bahas karena penulis menitikberatkan pada pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang sistem perjanjian bagi hasil ikan tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, serta mengkomparasikan dua hukum yaitu hukum positif dan hukum Islam tentang perjanjian bagi hasil. Dengan demikian bisa dinyatakan penulisan ini bukan merupakan duplikasi (plegiat) atau pengulangan dari penelitian sebelumnya

E. Kerangka Teoretik

Berdasarkan pokok masalah yang telah dikemukakan di atas untuk mempermudah pembahasan, penelitian ini menggunakan kerangka teoretik hukum positif dan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya *Hukum Perikatan* dijelaskan bahwa ketentuan pasal ini kurang begitu memuaskan, karena

ada beberapa kelemahan-kelemahan.⁹ Menurut beliau perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Apabila diperhatikan perumusan perjanjian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian ini sebagai berikut:

1. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu
3. Ada tujuan yang dicapai
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320

KUH Perdata ada empat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Megenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Mengenai perjanjian bagi hasil perikanan hukum positif memiliki sebuah aturan atau Undang-undang yakni Undang-undang No 16 Tahun 1964, yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 September 1964.

Menurut undang-undang ini perjanjian bagi hasil ialah:

Perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya.

⁹ Baca *Hukum Perikatan*, Abdulkadir Muhammad, cet. Ke-1 (Bandung: Penerbit Alumni, 1982) hlm. 77-78

Mengenai dibentuknya sebuah perjanjian, Undang-undang No. 2 Tahun 1960, tentang Perjanjian Bagi Hasil yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 07 Januari 1960, mengatur agar semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis. Hal ini agar memudahkan dalam menyelesaikan sebuah perkara apabila terjadi persengketaan karena ada bukti tertulis.

Kerja bagi hasil merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencari rizki atau karunia dari Allah SWT. Sebelum kerja bagi hasil langkah pertama adalah melakukan perjanjian

Istilah perjanjian menurut hukum Islam disebut dengan *akad* yaitu suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.¹⁰

Ada tiga unsur pokok atau tiga syarat *shighatul aqdi* yaitu:

1. Harus terang pengertiannya
2. Harus bersesuaian dengan *ijab* dan *qabul*
3. Memperhatikan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.¹¹

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.
2. Harus sama ridha dan ada pilihan

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, cet. ke-2 (Yogyakarta: UII Pers, 2004), hlm. 65

¹¹ Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-4 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 29

3. Harus jelas dan gamblang¹²

Islam telah menganjurkan dikuatkannya akad-akad dengan terjaminnya hak-hak dan tegaknya keadilan di antara sekalian manusia, maka Islam juga memperhatikan agar akad-akad itu dikuatkan dengan tulisan agar hak masing-masing orang dapat terjamin, terhindar dari pelanggaran dan kekhilafan. Serta mereka dapat menegakkan keadilan manakala terjadi perselisihan paham dan pertentangan. Seperti firman Allah SWT dalam al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ¹³

Perjanjian adalah termasuk dalam bidang muamalah, maka agar di dalamnya tercermin nilai-nilai keadilan hendaknya mengandung prinsip-prinsip muamalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat

¹² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3

¹³ Al-Baqarah (2): 282

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁴

Dalam hukum Islam istilah bagi hasil lahan pertanian ada beberapa macam yakni: *Musāqah* ialah kerja sama (*syirkah*) antara pemilik pohon dengan pemeliharaan pohon dengan perjanjian bagi hasil (*production sharing*), yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama¹⁵

Muzāra'ah atau *mukhābarah* ialah kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama¹⁶ Adapun perbedaannya ialah pada modal, artinya apakah modal itu dari petani pemilik tanah atau dari petani penggarap tanah.

Dari uraian di atas maka jelas bahwa perbedaan *musāqah* dan *muzāra'ah* atau *mukhābarah* ialah didalam *musāqah*, tanaman sudah ada tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya, sedangkan dalam *muzāra'ah* atau *mukhābarah* tanaman yang hendak ditanam belum ada.

Dari istilah bagi hasil di atas maka jelas bahwa perjanjian bagi hasil ikan tambak sebagaimana yang hendak penyusun bahas, masuk kategori *muzāra'ah* atau *mukhābarah*.

Menyangkut pembagian hasil dalam ketentuan hukum Islam tidak memberikan aturan, karena itu merupakan salah satu dari bagian yang ada dalam

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat...* hlm. 15

¹⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. ke-5 (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), hlm. 123

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 24

perjanjian, hanya saja Islam memberikan ajaran hendaknya secara ma'ruf dan adil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an

إن الله يأمر بالعدل والإحسان¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode merupakan peran yang utama dalam mencapai tujuan, terutama pada wilayah penelitian. Dengan memakai tehnik dan alat-alat tertentu, niscaya seorang peneliti akan mendapatkan kebenaran yang obyektif dan terarah dengan baik.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang relafan dalam skripsi ini, maka penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data atau sumber informasinya diperoleh dari lapangan yang digali secara intensif dilokasi penelitian

Adapun lokasi yang digunakan sebagai objek penelitian adalah daerah sekitar Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, karena sebagian desa-desa di wilayah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tanahnya digunakan sebagai lahan perikanan tambak, sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat penelitian, akan tetapi mengingat luasnya daerah serta keterbatasan waktu maka perlu diadakan sampel daerah penelitian. Adapun Desa-desa yang penyusun ambil sebagai sampel adalah Desa Manyar Rejo, Desa Leran dan Desa Banyuwangi

¹⁷ An-Nahl (16) : 90

dengan alasan bahwa ketiga desa tersebut merupakan desa yang paling banyak menggunakan sistem bagi hasil ikan tambak di banding desa-desa yang lainnya, serta tidak semuanya desa yang ada di Kecamatan Manyar mata pencahariannya dari hasil ikan tambak.

Untuk menunjang penelitian ini penyusun juga melakukan penelaahan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*,¹⁸ deskriptif karena dalam penelitian ini penyusun mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan fenomena sosial tentang pelaksanaan bagi hasil ikan tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Analisis komparatif artinya setelah penyusun mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan fenomena sosial, kemudian penyusun analisis atau nilai tingkat kesesuaian atau ketidaksesuaiannya dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku baik dari aspek hukum positif atau aspek hukum Islam. Kemudian penyusun analisis dengan mengkomparasikan kedua pandangan hukum tersebut dalam melihat dan menilai masalah perjanjian bagi hasil.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan dengan cara mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan pada aturan hukum atau undang-

¹⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm.6

undang yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah suatu cara untuk mengkaji masalah yang diteliti dengan melihat dan meneliti dalil-dalil yang dijadikan hujjah ulama dalam mengistimbatkan suatu hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil ikan tambak yang ada di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, maka penyusun menggunakan metode:

a. Metode *observasi* (pengamatan)

Yaitu suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan teratur terhadap masalah-masalah yang hendak penyusun bahas.

b. Metode *interview* (wawancara)

Yaitu suatu cara mengumpulkan data untuk mencari bahan-bahan keterangan dengan mengadakan wawancara langsung terhadap responden, kemudian mencatat hasil wawancara tersebut.

Dalam hal ini yang menjadi responden adalah:

- a. Camat Wilayah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
- b. Kepala Desa beserta aparat Desa
- c. Pemilik tambak
- d. Penggarap tambak

Adapun untuk memperoleh data atau keterangan dari pemilik tambak dan penggarap tambak, penyusun menggunakan teknik *random sampling*, yaitu cara pengambilan sampel secara sembarangan tanpa pilih-pilih, yaitu

terhadap responden yang memenuhi syarat dan mempunyai kesempatan untuk dipilih sebagai sampel.

5. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh melalui metode observasi dan interview serta dibantu dengan penelaahan buku-buku lain yang berkaitan dengan tema, maka penyusun analisis dengan menggunakan teknik analisis data secara *kualitatif*, adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

a. Metode induksi

Yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa kongkrit untuk kemudian digeneralisasikan. Metode ini digunakan dalam menyelidiki faktor apa yang secara umum melatarbelakangi masyarakat menggunakan sistem perjanjian bagi hasil ikan tambak secara tradisional atau adat.

b. Metode deduksi

Yaitu cara berfikir yang berangkat dari dalil-dalil bersifat umum untuk kemudian diturunkan pada peristiwa-peristiwa khusus. Metode ini digunakan untuk menelaah pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang ada di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud disini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi

(laporan penelitian) secara keseluruhan dari permulaan hingga ahir guna menghindari pembahasan yang tidak terarah, untuk itu penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

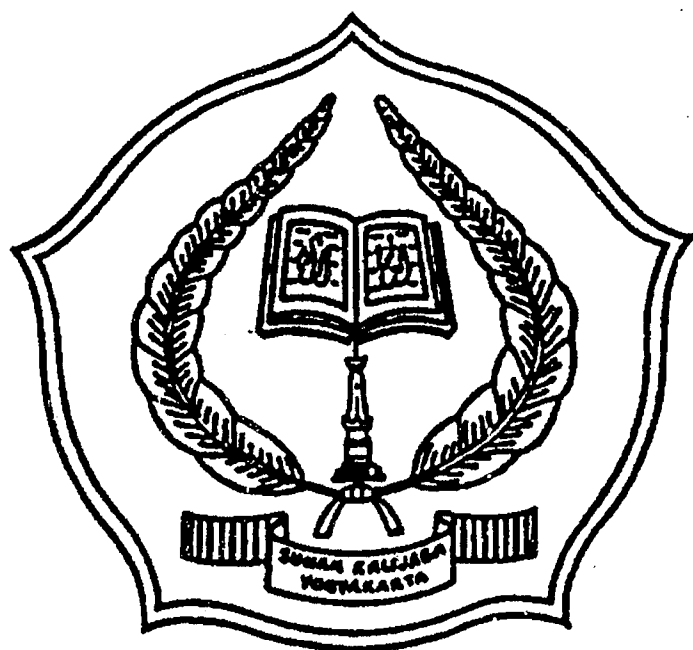
Bab *pertama* adalah pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* adalah sebagai teori-teori untuk membantu memecahkan masalah dalam skripsi ini, oleh karena itu bab kedua ini akan diuraikan gambaran umum tentang perjanjian bagi hasil menurut hukum positif dan hukum Islam, dengan beberapa sub sebagai berikut: pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, subjek perjanjian, objek perjanjian, asas-asas perjanjian serta batalnya perjanjian. Dan dalam bab ini juga akan diuraikan tentang perjanjian bagi hasil menurut hukum positif dan hukum Islam

Bab *ketiga* memuat hasil penelitian tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dengan uraian sebagai berikut: Gambaran umum tentang lokasi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan tambak dengan beberapa sub sebagai berikut: bentuk perjanjian, hak dan kewajiban pemilik dan penggarap, sistem perjanjian dan jangka waktu perjanjian. Di samping itu akan diuraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan penyelesaian masalah

Bab *keempat* memaparkan tentang analisis yang terbagi menjadi dua sub yaitu: analisis pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik perspektif hukum positif dan hukum Islam dan analisis komparasi pelaksanaan perjanjian bagi hasil kan tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik perspektif hukum positif dan hukum Islam, yakni persamaan dan perbedaan

Bab *kelima* adalah penutup, pada bab penutup ini memuat hal-hal penting yang relevan dengan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya tentang pandangan hukum positif dan hukum Islam terkait dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Manyar adalah sebagai petani khususnya petani tambak, hal ini dikarenakan luas area tanahnya sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian tambak. Mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan tambak masyarakat Manyar menggunakan hukum adat, artinya kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian saja tanpa ditulis dan tanpa saksi. Begitu juga dengan sistem perjanjian yang mereka pakai masih beraneka ragam, mengenai jangka waktu perjanjian yang dipakai adalah minimal satu kali panen, sedangkan mekanisme penyelesaian masalah dilakukan dengan jalan musyawarah. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat Manyar memakai hukum adat adalah adanya rasa saling percaya antara pemilik tambak dengan penggarap tambak, di samping itu ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya undang-undang tersebut dan minimnya masyarakat mengetahui perjanjian bagi hasil menurut hukum Islam.

2. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan tambak di Kecamatan Manyar kabupaten Gresik yang dilakukan secara adat, ditinjau dari segi:
 - a. Hukum positif, maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan tambak tersebut secara garis besar tidak sesuai dan tidak sah, hal ini karena aturan hukum positif mengenai bentuk perjanjian mengharuskan ditulis di hadapan Kepala Desa dan disaksikan oleh dua orang saksi yang kemudian disahkan oleh Camat setempat. Begitu juga mengenai sistem perjanjian yang menggunakan sistem 60 % : 40 % untuk ikan peliharaan, adapun jangka waktunya adalah minimal 6 musim atau 3 tahun berturut-turut.
 - b. Hukum Islam, maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan tambak tersebut secara garis besar sesuai dan sah karena syarat dan rukun mengenai perjanjian telah terpenuhi, di samping itu hukum Islam juga tidak menentukan sistem perjanjian dan jangka waktu perjanjian secara terperinci artinya semuanya tergantung ketika perjanjian tersebut dibuat.

B. Saran-saran

Setelah penyusun paparkan pada bab-bab sebelumnya tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan untuk meningkatkan sifat profesionalitas dari pada pemilik dan penggarap tambak dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil ikan tambak, kiranya penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah setempat memeberikan penyuluhan tentang Undang-undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan terhadap masyarakat, agar masyarakat mengetahui keberadaan undang-undang tersebut. Begitu juga para tokoh-tokoh agama untuk memberikan kesepahaman terhadap masyarakat tentang bagi hasil menurut agama Islam (*muzāra'ah*), karena mayoritas Masyarakat Manyar beragama Islam.
2. Sebaiknya pemilik dan penggrap dalam membuat perjanjian dalam bentuk tertulis serta adanya saksi serta jangka waktu juga harus dijelaskan untuk menjaga sesuatu hal yang tidak diinginkan.
3. Agar Undang-undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dapat diterima oleh masyarakat maka perlu diadakan penyempurnaan terhadap undang-undang tersebut, serta dilengkapi dengan peraturan-peraturan pada masing-masing wilayah yang tentunya dalam membuat peraturan tersebut melihat kondisi dari masyarakat setempat sehingga masyarakat dapat mematuhi peraturan yang ada.



DAFATR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Departemen Agama RI. 1980.

B. Kelompok Hadis

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismā'il al-, *Sahih al-Bukhārī*, Libanon: Dār al-Fikr, 1994.

Muslim, Imam Abu Husain, *Sahih Muslim*, Libanon: Dār al-Fikr, 1993.

C. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Anwar, Samsul, *Syarat dan Rukun Akad*, makalah disampaikan pada mata kuliah fiqh Muamalah II, UIN Sunun Kalijaga Yogyakarta, ttp, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Dahkan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, alih bahasa Abu Amar, Semarang: Cv Asy-Syifa', 1994.

Jazari, Abu Bakar Jabir al-, *Minhajul Muslim*, alih bahasa Musthofa 'Aini, Madinah: Maktabatul 'Ulum wal Hikam, 1998

Mas'ud, Ibnu, dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzab syafi'i*, 2 jilid, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Najib, Agus Moh., "Maqasid Al-Syari'ah," *Mazhabuna*, No.2, Januari 2003

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Shidieqy, Muhammad Hasbi Ash-, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pusaka Rizki Putra, 2001

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993.

C. Kelompok Lain-lain

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Harahab, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, 1986.

Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tinta Mas, 1974.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982.

Muwafiq, Ahmad, "Otonomi Daerah di Arus Kepentingan Global", makalah disampaikan pada seminar Otonomi Daerah tinjauan lokalitas, diselenggarakan oleh Graha Bhumi Pala Setda. Temanggung Jawa Tengah, 5 september 2005

Prodjodikoro, Wirjono *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Bale, 1989.

Rool, Werner, *Struktur Pemilikan Tanah di Indonesi*, Jakarta: CV Rajawali, 1983.

Setiawan R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bonacipta, 1987.

Subekti. SH., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1985.

_____, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 1985.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonosia Fakultas Ekonomi UII, 2003.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberti 1981.

Undang-undang No 2 tahun 1960, tentang *Perjanjian Bagi Hasil* yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 7 Januari 1960.

Undang-undang No 16 tahun 1964, tentang *Bagi Hasil Perikanan*, yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, pada tanggal: 23 September 1964